



DPR akan Bawa Audit BPK ke Presiden

Ditemukan 10 Kejanggalan

JAKARTA-Pimpinan DPR RI akan melakukan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya 10 kejanggalan kesiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Kejanggalan itu diketahui berdasarkan pemaparan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rapat dengan para wakil rakyat di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/7). Ketua DPR RI, Setya Novanto mengutarakan, hasil audit BPK soal kesiapan Pilkada 2015 menunjukkan anggaran, sumber daya manusia (SDM), hingga tahapan yang tidak sesuai aturan.

"DPR ingin membicarakan masalah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu saya usulkan kepada pemerintah untuk rapat konsultasi Presiden dan pimpinan DPR dan unsur penyelenggara Pemilu. Saya akan buat surat," ujar Setya Novanto kepada wartawan usai mendengarkan pemaparan dari BPK, Senin (13/7).

Dalam pemaparannya, BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap kesiapan Pilkada yang berupa 10 kejanggalan dan hal itu adalah masalah yang serius. Menurut politisi Golkar ini, kejanggalan itu sangat serius. "Ini sangat serius sekali. Persoalan ini untuk ditindaklanjuti," ucap Waketum Golkar hasil Munas Bali ini.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menambahkan, audit itu dilakukan berdasarkan permintaan pemimpin Komisi II DPR yang telah mengajukan surat permohonan secara internal dan institusional.

"Ini dilakukan agar Pilkada Serentak 2015 berlangsung aman, tertib dan lancar. Keinginan Komisi II untuk menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak," ungkapinya.

Oleh sebab itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu membantah bila agenda rapat dimasa reses ini menghambat proses pilkada seren-

tak pada Desember nanti. "Justru Pimpinan DPR mendorong KPU bekerja lebih keras jangan sampai terganggu pilkada," tukasnya.

Dia mengaku, rapat dengan BPK ini memang sudah diagendakan jauh-jauh hari sebelumnya dengan penyesuaian hasil audit BPK sebagai tindak lanjut dari permohonan pada masa sidang lalu.

"Satu sisi sebagai evaluasi proses pelaksanaan Pilkada, di sisi lain ini adalah rambu-rambu agar Pilkada ini sebagai starting poin bersama antara Pemerintah dan DPR dalam menyukseskan Pilkada serentak," terang Taufik.

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman mengatakan, secara gamblang dan terang telah dijelaskan sepuluh temuan yang diaudit. Seluruhnya tidak ada yang memuaskan. Hal ini bukan karena dirinya adalah Golkar, ini bukan perkara partai.

"Seperti yang disampaikan, biaya penyelenggaraan belum diyakini siap dan NPHD belum ditetapkan dan dilampiri dengan fakta integritas," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua BPK, Harry Azhar Azis. Dia mengungkapkan, audit terhadap kinerja KPU oleh pihaknya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dalam sidang pemimpin BPK.

"Setelah menerima surat dari pimpinan DPR atas rekomendasi Komisi II, kami memutuskan melakukan audit dengan tujuan tertentu. Kita mulai sejak tanggal 8 Juni 2015. Kita selesaikan hari ini tanggal 13 Juli 2015 jadi kurang lebih satu bulan," kata Harry.

Diketahui, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mencurigai DPR mengadakan rapat dengan BPK. Partai besutan Surya Paloh itu menuding rapat yang mendadak ini adalah salah satu upaya menunda pilkada. (aen)